



REPUBLIK INDONESIA

**KERANGKA PERSETUJUAN  
ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH REPUBLIK INDIA  
TENTANG  
KERJA SAMA EKSPLORASI DAN PENGGUNAAN ANTARIKSA  
UNTUK TUJUAN DAMAI**

**Pemerintah Republik Indonesia**

dan

**Pemerintah Republik India**

(selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak"),

**MENCATAT** kerja sama yang saling menguntungkan yang telah ada antara Para Pihak di bidang sains & teknologi antariksa;

**MENGAKUI** Kerja Sama antara Para Pihak di bidang dukungan Telemetri, Penjejukan, dan Pengendalian (TT&C) untuk peluncuran wahana-wahana dan satelit-satelit India melalui Stasiun-stasiun TT&C yang dibangun di Biak Indonesia dan di bidang pengembangan kapasitas;

**MEMPERHITUNGGAN** risalah yang disepakati dari Pertemuan Komite Bersama Kedua tentang kerja sama antariksa antara ISRO dan LAPAN yang diselenggarakan pada 28-29 Juni 2011 di New Delhi, Pertemuan Komite Bersama Ketiga LAPAN-ISRO tentang Antariksa yang diselenggarakan di Jakarta pada 17-19 November 2014, dan Pertemuan Komite Bersama Keempat ISRO-LAPAN tentang Antariksa yang diadakan di Bengaluru pada 14-15 November 2017;

*[Handwritten signature]*

**MEMPERTIMBANGKAN** ketentuan-ketentuan dalam Traktat mengenai Prinsip-prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, termasuk Bulan dan Benda-benda Langit Lainnya, 27 Januari 1967 dan traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian multilateral yang terkait tentang eksplorasi dan penggunaan antariksa di mana kedua Pemerintah menjadi Pihak, yang mendorong kerja sama internasional untuk eksplorasi dan penggunaan antariksa untuk tujuan damai;

**MENYATAKAN** keinginan bersama mereka untuk meningkatkan kerja sama jangka panjang mereka di bidang eksplorasi antariksa dan pemanfaatan teknologi-teknologi antariksa untuk kepentingan rakyat kedua Negara;

**BERUPAYA** untuk melestarikan antariksa untuk tujuan-tujuan damai yang terbuka untuk kerja sama internasional yang luas;

**BERKEINGINAN** untuk menetapkan kerangka hukum umum untuk memfasilitasi kerja sama dalam penggunaan antariksa secara damai antara kedua Pihak dan penyelesaian dari Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan untuk kerja sama antara badan-badan pelaksana mereka;

**SESUAI** dengan perundang-undangan dan regulasi nasional yang berlaku di masing-masing Negara;

**TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:**

#### **PASAL 1**

##### **Tujuan**

Para Pihak wajib mempromosikan kerja sama antara kedua Negara di bidang penelitian antariksa dan penggunaan antariksa untuk tujuan-tujuan damai sesuai

*Handwritten signature*

dengan perundang-undangan dan regulasi masing-masing negara yang berlaku dan kewajiban-kewajiban, komitmen-komitmen, dan prinsip-prinsip hukum internasional mereka.

## PASAL 2

### Badan-Badan Pelaksana dan Lembaga-Lembaga yang Ditunjuk

1. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Pemerintah Republik India menunjuk *Indian Space Research Organisation* (ISRO) sebagai masing-masing Badan Pelaksana mereka, yang akan bertanggung jawab untuk pengembangan, koordinasi, dan pengendalian kerja sama, serta melaksanakan Program-program Kerja Sama yang digambarkan dalam Kerangka Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik India tentang Kerja Sama Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa untuk Tujuan Damai ini (selanjutnya disebut sebagai "Persetujuan").
2. Para Pihak atau Badan-badan Pelaksana dalam keterbatasan kompetensi mereka dapat menunjuk lembaga-lembaga lain untuk mengembangkan Program-program Kerja Sama di bidang-bidang yang disebutkan dalam Pasal 3 di bawah. Dalam hal demikian, Pihak atau Badan Pelaksananya tersebut wajib memberitahukan Pihak lainnya atau Badan Pelaksananya lembaga yang ditunjuk yang bertanggung jawab atas Program Kerja Sama.
3. Penunjukan atas lembaga-lembaga lain untuk pengembangan dan pelaksanaan Program-program Kerja Sama yang disebutkan dalam Pasal 3 Persetujuan ini wajib disetujui bersama oleh Para Pihak.

### PASAL 3

#### Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang Lingkup kerja sama berdasarkan Persetujuan ini adalah sebagai berikut:

- a. Sains antariksa, eksplorasi antariksa, penggunaan teknologi antariksa, pemantauan lingkungan bumi dari antariksa, dan penginderaan jauh bumi;
- b. Mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama multidisiplin dalam pemanfaatan praktis dari teknologi antariksa dan menggunakan manfaat-manfaat *spin-off* dari teknologi-teknologi antariksa;
- c. Pengoperasian, pemeliharaan, penambahan, peningkatan, dan penggunaan Stasiun Bumi Biak Terintegrasi untuk keuntungan bersama kedua Pihak;
- d. Menjadi penyelenggara dari Stasiun Bumi India di Indonesia untuk Satelit-satelit Penginderaan Jauh India termasuk menyebarkan data;
- e. Menjadi penyelenggara dari peralatan *IRNSS Range and Integrity Monitoring Station* (IRIMS) untuk Program NAVIC;
- f. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan bersama di bidang teknologi antariksa termasuk roket-roket sonda;
- g. Pengoperasian dan pemanfaatan satelit-satelit, dan penitipan muatan pada satelit untuk misi-misi sains antariksa;
- h. Dukungan dalam bentuk layanan-layanan peluncuran atas 2 (dua) satelit buatan LAPAN setiap 5 (lima) tahun;
- i. Pemanfaatan silang stasiun-stasiun bumi yang dimiliki oleh Para Pihak;
- j. Pertukaran personil teknis dan ilmiah yang ditunjuk untuk berpartisipasi dalam program-program kerja sama;
- k. Penyelenggaraan pelatihan, loka karya, dan program-program seminar di bidang yang diminati bersama;
- l. Lingkup kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis oleh Para Pihak.

*[Handwritten signature]*

#### PASAL 4

##### Perjanjian-Perjanjian Pelaksanaan dan Program-Program Kerja Sama

1. Untuk pelaksanaan Persetujuan ini, Para Pihak dapat membuat Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan spesifik, yang wajib merujuk dan tunduk pada Persetujuan ini, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.
2. Badan-badan Pelaksana dan lembaga-lembaga lain yang ditunjuk dapat, dengan tunduk pada prosedur-prosedur yang ditetapkan oleh perundang-undangan dan regulasi masing-masing Negara mereka:
  - a. menyetujui Program-program Kerja Sama spesifik, yang akan menentukan prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan, pelaksanaan dan, jika diperlukan, bantuan finansial untuk program-program dimaksud;
  - b. membuat Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan, yang wajib menyertakan, dengan sewajarnya, ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sifat dan lingkup dari Program-program Kerja Sama dan tanggung jawab individual dan umum dari Badan-badan Pelaksana atau lembaga-lembaga lain yang ditunjuk. Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan tersebut wajib merujuk dan tunduk pada Persetujuan ini.
3. Sesuai dengan perundang-undangan, regulasi, dan kebijakan yang berlaku pada masing-masing Negara, dan berdasarkan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak, pihak ketiga lainnya dapat berpartisipasi dalam Program-program Kerja Sama yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini. Partisipasi dari pihak-pihak ketiga tersebut harus dibuat dalam pengaturan-pengaturan terpisah.

## **PASAL 5**

### **Kelompok Kerja Bersama dan Tim-Tim Proyek**

1. Para Pihak wajib membentuk suatu Kelompok Kerja Bersama dengan anggota-anggota dari kedua Pihak dan dipimpin bersama oleh kandidat-kandidat dari kedua Pihak untuk tujuan mencapai tujuan dari Persetujuan ini.
2. Kelompok Kerja Bersama harus bertemu setidaknya-tidaknya satu kali dalam setahun, secara bergantian di Indonesia dan India.
3. Kelompok Kerja Bersama wajib bertanggung jawab untuk menguji Program-program Kerja Sama, menindaklanjuti pelaksanaan mereka, mempromosikan kerja sama antara kedua negara dalam lingkup Persetujuan ini, dan secara umum menguji semua pertanyaan yang berhubungan dengan kinerja dari Persetujuan ini dan menemukan sejauh mungkin solusi damai untuk setiap perselisihan yang mungkin timbul antara Para Pihak.
4. Para Pihak atau, atas otoritas mereka, Badan-badan Pelaksana, dapat membentuk Tim-tim Proyek jika diperlukan, untuk mengelola proyek-proyek kerja sama spesifik yang diambil berdasarkan Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan.

## **PASAL 6**

### **Prinsip-Prinsip Pembiayaan**

1. Para Pihak menginginkan bahwa Program-program yang disetujui bersama wajib dilaksanakan atas dasar kerja sama. Pengaturan pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan tersebut wajib disetujui oleh Para Pihak secara bersama-sama berdasarkan kasus per kasus.

2. Pembiayaan dari kegiatan-kegiatan bersama yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini wajib disediakan oleh Para Pihak sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi masing-masing Pihak dan berdasar pada ketersediaan dana yang dialokasikan untuk tujuan-tujuan ini.
3. Detail pembiayaan dari tiap proyek wajib dibuat dalam masing-masing perjanjian pelaksanaan.
4. Tidak ada dalam Pasal ini harus diartikan sebagai menciptakan kewajiban-kewajiban tambahan untuk Republik Indonesia dan Republik India mengenai ketentuan-ketentuan anggaran untuk membiayai kerja sama yang dilaksanakan sesuai dengan Persetujuan ini.

## **PASAL 7**

### **Kekayaan Intelektual**

1. Para Pihak dan masing-masing Badan-badan Pelaksana mereka serta masing-masing lembaga yang ditunjuk mereka, berkewajiban untuk memastikan perlindungan efektif atas kekayaan intelektual yang dibuat dan hak-hak yang didapat dari Program-program Kerja Sama yang dilaksanakan berdasarkan Persetujuan ini, sesuai dengan perundang-undangan nasional yang berlaku dari masing-masing Pihak dan perjanjian-perjanjian internasional di mana mereka menjadi pihak.
2. Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang detail dan spesifik yang akan menentukan kepemilikan dari kekayaan intelektual termasuk kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Persetujuan ini akan dijelaskan dalam tiap Perjanjian Pelaksanaan.
3. Badan-badan Pelaksana wajib memberitahukan satu sama lain secara tepat waktu atas setiap pekerjaan penemuan atau hak cipta yang timbul dari

20

20-121

Persetujuan ini dan Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan dan sesegera mungkin mencari perlindungan atas kekayaan intelektual tersebut.

#### **PASAL 8**

##### **Pengalihan Kepemilikan dan Pemanfaatan Lebih Lanjut atas Fasilitas-Fasilitas TT&C Biak Terintegrasi**

Para Pihak menyetujui bahwa untuk pengalihan kepemilikan dan pemanfaatan lebih lanjut atas Fasilitas TT&C Biak Terintegrasi dari ISRO kepada LAPAN, masing-masing perjanjian terpisah harus disampaikan melalui diskusi bersama antara Para Pihak dalam waktu 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Persetujuan.

#### **PASAL 9**

##### **Pertukaran Informasi**

1. Sesuai dengan masing-masing perundang-undangan dan regulasi mereka, dan memperhatikan kondisi dari kerahasiaan yang digambarkan di bawah Pasal 10 Persetujuan ini, Para Pihak dan masing-masing Badan Pelaksana mereka wajib menyediakan akses, atas dasar timbal balik dan dalam waktu yang sewajarnya, terhadap hasil-hasil dari penelitian ilmiah dan pekerjaan bersama yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini sesuai dengan Perjanjian Pelaksanaan pada setiap bidang kerja sama dipilih.
2. Para Pihak wajib bertukar hasil-hasil teknis dan ilmiah dari setiap kerja sama yang disiapkan dan dilakukan berdasarkan Persetujuan ini dan Perjanjian Pelaksanaan. Hasil-hasil tersebut tidak dapat dialihkan kepada pihak-pihak ketiga tanpa kesepakatan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
3. Para Pihak, melalui Badan-badan Pelaksana mereka sesuai dengan



perundang-undangan nasional mereka yang berlaku mengenai informasi pembatasan akses, wajib memfasilitasi pertukaran informasi secara timbal balik mengenai tujuan dasar dari program-program keantariksaan nasional mereka masing-masing.

#### **PASAL 10**

##### **Kerahasiaan**

1. Seluruh informasi yang dipertukarkan oleh Para Pihak dan masing-masing Badan Pelaksana mereka selama pelaksanaan program-program kerja sama wajib dipertimbangkan sebagai rahasia kecuali dinyatakan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis.
2. Setiap Perjanjian Pelaksanaan akan menjelaskan, antara lain, syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari pertukaran informasi rahasia yang berkaitan dengan Program-program Kerja Sama.

#### **PASAL 11**

##### **Regulasi-Regulasi Kepabeanan dan Pertukaran Personil**

1. Sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi yang terkait, tiap Pihak wajib menyediakan rekomendasi untuk pekerjaan dan pengurusan kepabeanan terhadap pembebasan dari, dengan upaya terbaik, seluruh bea-bea kepabeanan dan pajak-pajak untuk peralatan dan barang-barang yang terkait yang diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan ini. Pengaturan-pengaturan tersebut akan sepenuhnya berlaku timbal balik dan sesuai dengan masing-masing perundang-undangan dan regulasi terkait yang mengatur Para Pihak.

22

20.121

2. Tiap Pihak wajib menyediakan rekomendasi untuk visa-visa, izin tinggal, dan izin-izin yang diperlukan lainnya untuk kunjungan personil dari Pihak lainnya sesuai dengan Persetujuan ini.
3. Para Pihak wajib memastikan bahwa personil mereka yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan di bawah Persetujuan ini wajib menghormati kebebasan politik, kedaulatan, dan integritas teritorial dari negara tuan rumah, dan berkewajiban untuk tidak mengganggu urusan-urusan internal dari negara tuan rumah.
4. Para Pihak wajib memastikan bahwa peralatan mereka yang digunakan dalam kegiatan-kegiatan yang disetujui berdasarkan Persetujuan ini tidak akan digunakan untuk tujuan apapun selain yang ditetapkan dalam Persetujuan ini.

## **PASAL 12**

### **Pengalihan Barang dan Data Teknis**

Seluruh pengalihan barang dan data teknis oleh Para Pihak wajib dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan regulasi nasional mereka.

## **PASAL 13**

### **Pertanggungjawaban**

Para Pihak dan masing-masing Badan Pelaksana mereka setuju pada suatu pelepasan tuntutan secara timbal balik yang komprehensif di antara mereka dan lembaga-lembaga yang ditunjuk lainnya atas kerusakan-kerusakan yang disebabkan terhadap barang-barang mereka atau kehilangan personil yang terlibat secara langsung pada pelaksanaan Persetujuan ini.

## **PASAL 14**

### **Perubahan**

Persetujuan ini dapat diubah setiap saat dengan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak. Amendemen-amandemen tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan ini.

## **PASAL 15**

### **Penyelesaian Perselisihan**

Para Pihak dan Badan-badan Pelaksana mereka wajib berusaha semaksimalnya untuk menyelesaikan secara damai setiap perselisihan mengenai interpretasi dan pelaksanaan Persetujuan ini melalui negosiasi-negosiasi secara langsung.

## **PASAL 16**

### **Penggantian MSP 1997 dan MSP 2002**

Dengan berlakunya Persetujuan ini, 2 (dua) Memorandum Saling Pengertian berikut wajib secara otomatis tergantikan:

- a. Memorandum Saling Pengertian antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Republik Indonesia dan *Indian Space Research Organisation* (ISRO) Republik India mengenai Kerja Sama dalam Pembangunan Stasiun Telemetry, Penjajakan, dan Pengendalian untuk Satelit-satelit dan Peluncuran Wahana-wahana, ditandatangani di Jakarta pada 25 April 1997.
- b. Memorandum Saling Pengertian antara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia dan *Indian Space Research*

*Organisation* Republik India mengenai Kerja Sama di Bidang Penelitian dan Pengembangan Antariksa, ditandatangani di New Delhi pada 3 April 2002.

## **PASAL 17**

### **Pemberlakuan, Masa Berlaku dan Pengakhiran**

1. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal penerimaan pemberitahuan terakhir di mana Para Pihak saling menginformasikan melalui jalur diplomatik mengenai pemenuhan internal prosedurnya yang diperlukan untuk pemberlakuan Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini wajib tetap berlaku untuk periode 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap periode 5 (lima) tahun berikutnya dengan kesepakatan tertulis bersama Para Pihak 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
3. Persetujuan ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui jalur diplomatik. Pengakhiran wajib berlaku efektif 6 (enam) bulan setelah tanggal pemberitahuan.
4. Dalam hal pengakhiran atau berakhirnya Persetujuan ini, ketentuan-ketentuannya wajib tetap berlaku terhadap seluruh Perjanjian-perjanjian Pelaksanaan yang berlaku pada saat pengakhiran atau berakhirnya seluruh program-program dan proyek-proyek yang belum selesai, kecuali Para Pihak tidak setuju sebaliknya. Pengakhiran Persetujuan ini tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan atau pengakhiran kewajiban yang bersifat finansial atau kontraktual yang masih berlaku dan tidak dapat memengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari para subjek hukum dan para warga negara yang telah timbul sebelum pengakhiran Persetujuan ini.

**SEBAGAI BUKTI**, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh oleh masing-masing Pemerintah, telah menandatangani Persetujuan ini

Dibuat dalam dua rangkap asli di New Delhi, India pada tanggal 22 Mei 2018 dan di Jakarta, Indonesia pada tanggal 28 Mei 2018, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Hindi, dan Inggris, ketiga naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi terhadap Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang wajib berlaku.

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

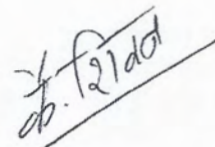


**THOMAS DJAMALUDDIN**

KEPALA LAPAN

Tanggal: Mei 2018

UNTUK PEMERINTAH  
REPUBLIK INDIA



**K. SIVAN**

SEKRETARIS DOS / KEPALA ISRO

Tanggal: Mei 2018



REPUBLIK INDONESIA

इंडोनेशिया गणराज्य सरकार

एवं

भारत गणराज्य सरकार

के बीच

शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु

बाह्य अंतरिक्ष अन्वेषण एवं उपयोग के लिए

सहयोग पर

ढाँचा करार

इंडोनेशिया गणराज्य सरकार

एवं

भारत गणराज्य सरकार

(इन्हें आगे सामूहिक रूप में "पक्षकार" कहा गया है) ने

अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पक्षकारों के बीच मौजूदा परस्पर लाभकारी सहयोग को नोट करते हुए;

इंडोनेशिया के बियाक में स्थापित दूरमिति, अनुवर्तन एवं आदेश (टी.टी. एवं सी.) स्टेशनों के माध्यम से भारतीय उपग्रहों तथा प्रमोचक राकेटों के लिए टी.टी. एवं सी. सहायता तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्र में पक्षकारों के बीच सहयोग की पहचान करते हुए;

नई दिल्ली में 28-29 जून, 2011 के दौरान इसरो और लापान के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर दूसरी संयुक्त समिति की बैठक, जकार्ता में 17-19 नवंबर, 2014 को बाह्य अंतरिक्ष पर लापान-इसरो की तीसरी संयुक्त समिति की बैठक, बेंगलूर में 14-15 नवंबर, 2017 को बाह्य अंतरिक्ष पर इसरो-लापान की चौथी संयुक्त समिति को बैठक के सहमत कार्यवृत्त को ध्यान में रखते हुए;

ॐ २

27 जनवरी, 1967 के चंद्र तथा अन्य खगोलीय पिंडों को शामिल करते हुए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग पर देश की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि के प्रावधानों तथा बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग पर अन्य संबंधित बहु पक्षीय संधियों और करारों, जिसमें दोनों सरकारें पक्षकार हैं और जो बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा शांतिपूर्ण उपयोगों के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं, इस बात पर विचार करते हुए;

बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण के क्षेत्र में अपने दीर्घकालीन सहयोग तथा दोनों राष्ट्रों की जनता के लाभार्थ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग को बढ़ाने की अपनी परस्पर इच्छा को व्यक्त करते हुए;

शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए बाह्य अंतरिक्ष को संरक्षित रखने के लिए विस्तृत अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकल्प को खुला रखने की माँग करते हुए;

दोनों पक्षकारों के बीच बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोगों में सहयोग हेतु और उनकी संबंधित एजेंसियों के बीच क्रियान्वयन व्यवस्थाओं को तय करने के लिए एक समग्र कानूनी ढांचा स्थापित करने की इच्छा रखते हुए;

संबंधित राष्ट्रों में मौजूद कानूनों तथा विनियमों के अनुसार;

निम्नानुसार सहमति दी है:

### अनुच्छेद 1

#### उद्देश्य

पक्षकार संबंधित राष्ट्रीय कानून एवं लागू विनियमों के अनुसार तथा उनके अंतरराष्ट्रीय दायित्वों, प्रतिबद्धताओं तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार, बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान और बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उद्देश्य हेतु उपयोग के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे।

### अनुच्छेद 2

#### कार्यान्वयन एजेंसियाँ एवं निर्दिष्ट संस्थाएं

1. इंडोनेशिया गणराज्य सरकार, राष्ट्रीय वैमानिकी तथा अंतरिक्ष संस्थान (लापान) को तथा भारत गणराज्य सरकार, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को अपने संबंधित कार्यान्वयन

क. शि

एजेंसी के रूप में नामित करते हैं जो इंडोनेशिया गणराज्य सरकार और भारत गणराज्य सरकार के बीच शांतिपूर्ण उद्देश्यों हेतु बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण तथा उपयोग पर सहयोग हेतु ढाँचा करार में अभिकल्पित सहयोग के विकास, समन्वय तथा नियंत्रण के लिए और सहयोगी कार्यक्रमों को पूरा करने हेतु जिम्मेदार होंगे (इसे आगे "करार" कहा गया है)।

2. पक्षकार या कार्यान्वयन एजेंसियाँ अपनी क्षमता की सीमा में नीचे दिए गए अनुच्छेद 3 में उल्लिखित क्षेत्रों में सहयोग के कार्यक्रमों का विकास करने हेतु अन्य संस्थाओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं। ऐसे मामले में, वह पक्षकार अथवा उसकी क्रियान्वयन एजेंसी इस सहयोगी कार्यक्रम के निर्दिष्ट प्रभारी संस्था के बारे में अन्य पक्षकार अथवा या क्रियान्वयन एजेंसी को सही रूप में सूचित करेगी।
3. इस करार के अनुच्छेद 3 में दिए गए सहयोगी कार्यक्रमों के विकास तथा निष्पादन हेतु अन्य किसी संस्था को निर्दिष्ट करना पक्षकारों के पारस्परिक सहमति के आधार पर होगा।

### अनुच्छेद 3

#### सहयोग का कार्यक्षेत्र

1. इस करार के तहत सहयोग के कार्यक्षेत्र निम्नानुसार होंगे:
- (क) अंतरिक्ष विज्ञान, बाह्य अंतरिक्ष का अन्वेषण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के पर्यावरण का मानीटरन तथा पृथ्वी का सुदूर संवेदन;
  - (ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रायोगिक अनुप्रयोग में बहु-विषयक सहयोग का विकास तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के स्पिन-ऑफ लाभों का उपयोग;
  - (ग) दोनों पक्षकारों के पारस्परिक लाभ के लिए समेकित बियाक भू स्टेशनों का प्रचालन, रख-रखाव, संवर्धन, उन्नयन तथा उपयोग;
  - (घ) आँकड़ों को साझा करने की बात शामिल करते हुए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए इंडोनेशिया में भारतीय भू स्टेशन को होस्ट करना;
  - (ङ) नाविक कार्यक्रम के लिए आई.आर.एन.एस.एस. रेंज तथा समेकन मानीटरन स्टेशन (आई.आर.आई.एम.एस.) उपकरण को होस्ट करना;

क. शि



- (च) परिज्ञापी राकेटों को शामिल करते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में संयुक्त अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियां;
- (छ) अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों के लिए उपग्रहों का प्रचालन तथा उपयोग और नीतभार होस्टिंग;
- (ज) प्रत्येक 5 (पाँच) वर्षों में 2 (दो) लापान निर्मित उपग्रहों के प्रमोचन सेवा में सहयोग;
- (झ) पक्षकारों द्वारा स्वामित्व वाले भू-स्टेशनों का पूर्ण उपयोग;
- (ञ) सहयोगी कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु नामित वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों का आदान-प्रदान;
- (त) पारस्परिक रुचि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण, कार्यशाला तथा संगोष्ठी संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन;
- (थ) पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमत सहयोग के अन्य क्षेत्र।

#### अनुच्छेद 4

##### क्रियान्वयन व्यवस्था एवं सहयोगी कार्यक्रम

1. इस करार के कार्यान्वयन हेतु पक्षकार विशिष्ट क्रियान्वयन व्यवस्था तय कर सकते हैं जो इस करार के संदर्भ में होगा और इसके अधीन होगा, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हों।
2. क्रियान्वयन एजेंसी तथा अन्य निर्दिष्ट संस्थाएं, अपने संबंधित देशों के कानून एवं विनियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत :
  - क) विशिष्ट सहयोगी कार्यक्रमों पर सहमत हो सकते हैं, जो संगठन, कार्यान्वयन तथा आवश्यक हुआ तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता से संबंधित सिद्धांतों, नियमों व प्रक्रिया को निर्धारित करेगा;
  - ख) क्रियान्वयन व्यवस्था तय कर सकते हैं, जिसमें यथोचित, सहयोगी कार्यक्रमों की प्रकृति व कार्यक्षेत्र से संबंधित प्रावधान, क्रियान्वयन एजेंसियों अथवा निर्दिष्ट संस्थानों की पृथक व साझी जिम्मेदारियाँ शामिल होंगी। ऐसी क्रियान्वयन व्यवस्थाएं इस करार के संदर्भ में होंगी और इसके अधीन होंगी।

3. संबंधित देशों के मौजूदा कानून, विनियम तथा नीतियों के अनुसार और पक्षकारों की परस्पर लिखित सहमति से इस करार के ढांचे के अंतर्गत आयोजित सहयोगी कार्यक्रमों में कोई अन्य तीसरा पक्षकार भाग ले सकेगा। तीसरे पक्षकारों की ऐसी भागीदारी अलग व्यवस्थाओं द्वारा तय की जाएगी।

#### अनुच्छेद 5

##### संयुक्त कार्यदल तथा परियोजना टीम

1. इस करार के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से पक्षकारों द्वारा एक संयुक्त कार्यकारी दल गठित किया जाएगा और इस करार के लक्ष्य की प्राप्ति के उद्देश्य से दोनों पक्षकारों की ओर से नामित व्यक्ति इसकी सह-अध्यक्षता करेंगे।
2. यह संयुक्त कार्यदल एकांतर रूप से इंडोनेशिया तथा भारत में वर्ष में एक बार बैठक करेगा।
3. यह संयुक्त कार्यदल सहयोगी कार्यक्रमों पर विचार करने, उनके कार्यान्वयन का अनुसरण करने, इस करार की परिधि में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, और सामान्य तौर पर इस करार के कार्य-निष्पादन के संबंध में सभी प्रश्नों की जाँच करने तथा यथासंभव पक्षकारों के बीच उठने वाले विवादों के लिए समाधान ढूंढने हेतु जिम्मेदार होगा।
4. पक्षकारों अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत, क्रियान्वयन एजेंसियाँ, यदि आवश्यक हो, तो क्रियान्वयन व्यवस्थाओं के तहत विशिष्ट सहयोगी परियोजनाओं का प्रबंधन करने हेतु परियोजना टीम का गठन कर सकते हैं।

#### अनुच्छेद 6

##### वित्त पोषण के सिद्धांत

1. पक्षकारों की इच्छा है कि परस्पर सहमति से निर्धारित कार्यक्रम सहयोगी आधार पर निष्पादित किए जाएंगे। ऐसे क्रियाकलापों के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था का निर्णय प्रत्येक मामले के आधार पर परस्पर सहमति से पक्षकारों द्वारा किया जाएगा।
2. इस करार के अनुसरण में किए गए वित्त पोषण संबंधी संयुक्त क्रियाकलाप पक्षकारों द्वारा संबंधित कानून एवं विनियमों के अनुसार और इस उद्देश्य के लिए आबंटित निधि की उपलब्धि के आधार पर किए जाएंगे।

क.रि

3. प्रत्येक परियोजना के विस्तृत वित्त पोषण की व्यवस्था संबंधित क्रियान्वयन व्यवस्था में शामिल की जाएगी।
4. इस अनुच्छेद से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि इस करार के अनुसरण में किए गए वित्तीय सहयोग के कार्यों का बजट संबंधी प्रावधानों से संबंधित इंडोनेशिया गणराज्य सरकार तथा भारत गणराज्य सरकार के लिए कोई अतिरिक्त दायित्व है।

#### अनुच्छेद 7

#### बौद्धिक संपदा

1. पक्षकार और उनकी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियाँ तथा अन्य निर्दिष्ट संस्थाएं सृजित बौद्धिक और इस करार के तहत किए गए सहयोगी कार्यक्रमों से प्राप्त अधिकारों को प्रत्येक पक्षकार के मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों तथा अंतरराष्ट्रीय करारों, जिसके वे पक्षकार हैं, के अनुसार प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित करना अपना कर्तव्य समझें।
2. इस करार के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप, बौद्धिक संपदा को शामिल करते हुए बौद्धिक संपत्ति का स्वामित्व निर्धारित करने वाली विशेष व विस्तृत निबंधन एवं शर्तें, प्रत्येक क्रियान्वयन व्यवस्था में निर्दिष्ट किए जाएंगे।
3. क्रियान्वयन एजेंसियाँ, इस करार तथा क्रियान्वयन व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली किसी भी नई खोज या कॉपीराइट कार्यों के बारे में एक दूसरे को यथा समय सूचित करेंगे और इस बौद्धिक संपदा के संरक्षण की तत्काल व्यवस्था करेंगे।

#### अनुच्छेद 8

स्वामित्व का अंतरण तथा एकीकृत बियाक टी.टी. एवं सी. सुविधाओं का और अधिक उपयोग पक्षकार, इस करार पर हस्ताक्षर करने के 6 (छह) माह के भीतर पक्षकार पारस्परिक चर्चा के माध्यम से, इसरो से लापान को स्वामित्व के अंतरण तथा एकीकृत बियाक टी.टी. एवं सी. सुविधाओं के और अधिक उपयोग के लिए संबंधित अलग करारों को करने हेतु सहमत हुए।

## अनुच्छेद 9

### सूचना का आदान प्रदान

1. संबंधित कानून एवं विनियमों के अनुसार, और इस करार के अनुच्छेद 10 के तहत गोपनीयता की स्थिति का ध्यान रखते हुए, पक्षकार तथा उनकी क्रियान्वयन एजेंसियाँ सहयोग के किसी चयनित क्षेत्र में क्रियान्वयन व्यवस्था के अनुसार इस करार के ढांचे के अंदर संयुक्त रूप से किए गए कार्य एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के परिणामों के लिए परस्पर अभिगम उचित समय में, उपलब्ध कराएंगे।
2. पक्षकार इस करार तथा क्रियान्वयन व्यवस्था के तहत किए गए सहयोग से प्राप्त वैज्ञानिक व तकनीकी परिणामों का आदान-प्रदान करेंगे। ऐसे परिणामों को किसी तीसरे पक्षकार को, पूर्व परस्पर सहमति के बिना हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है।
3. पक्षकार अपनी क्रियान्वयन एजेंसियों के जरिए, सीमित अभिगम की सूचना से संबंधित मौजूदा, राष्ट्रीय कानून के अनुसार, अपने राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों के मूल निर्देशों से संबंधित सूचना के परस्पर आदान-प्रदान को साध्य बनाएंगे।

## अनुच्छेद 10

### गोपनीयता

इस सहयोगी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के दौरान पक्षकारों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा आदान-प्रदान की गई सूचना गोपनीय समझी जाएगी जब तक कि पक्षकारों द्वारा लिखित रूप में अन्यथा व्यक्त न किया गया हो।

अन्य बातों के साथ-साथ, प्रत्येक क्रियान्वयन व्यवस्था में सहयोगी कार्यक्रमों से संबंधित आदान-प्रदान की गई गोपनीय सूचना की निबंधन एवं शर्तें निर्दिष्ट की जाएंगी।

## अनुच्छेद 11

### सीमा शुल्क विनियम और कार्मिकों का आदान-प्रदान

1. संबद्ध कानूनों एवं विनियमों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार सीमा शुल्क अनापत्ति प्रदान करने हेतु सिफारिश करेगा और इस करार के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक संबंधित माल तथा उपकरणों के लिए लागू सभी सीमा शुल्क तथा करों से छूट प्रदान करवाने के लिए संभव प्रयास करेगा। ऐसी व्यवस्था पूर्णतः परस्पर आधार पर होंगी और पक्षकारों के संबंधित कानून एवं विनियमों के अनुसार होंगी।

2. प्रत्येक पक्षकार इस करार के अनुसरण में दूसरे पक्षकार के कार्मिकों के दौरे सुसाध्य बनाएगा और इस कार्य हेतु अपेक्षित वीजा, स्टे परमिट और अन्य सभी आवश्यक अनुमति हेतु सिफारिश करेगा।
3. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस करार के तहत निर्धारित क्रियाकलापों में लगे कार्मिक एवं उपकरण मेजबान देश की राजनीतिक स्वातंत्रता, संप्रभुता तथा भौमिक अखंडता का सम्मान करेंगे और मेजबान देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना उनका कर्तव्य होगा।
4. पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि इस करार के तहत सहमत गतिविधियों में शामिल उनके उपकरण इस करार के अलावा अन्य किसी उद्देश्य हेतु प्रयोग नहीं किए जाएंगे।

#### अनुच्छेद 12

##### माल तथा तकनीकी आँकड़ों का हस्तांतरण

पक्षकारों द्वारा सभी मालों तथा तकनीकी आँकड़ों का हस्तांतरण उनके राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमों के अनुसार किया जाएगा।

#### अनुच्छेद 13

##### दायित्व

पक्षकार तथा उनकी संबंधित क्रियान्वयन एजेंसियाँ इस करार के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से अपने-अपने निजी माल या कार्मिकों को हुई क्षति के लिए व्यापक पारस्परिक दावों से छूट देने पर सहमत हैं।

#### अनुच्छेद 14

##### संशोधन

इस करार में पक्षकार किसी भी समय पारस्परिक लिखित सहमति से संशोधन कर सकते हैं। ऐसे संशोधन पक्षकारों द्वारा निर्धारित दिनांक से प्रभावी होंगे तथा इस करार के अभिन्न अंग होंगे।

#### अनुच्छेद 15

##### विवादों का निपटान

पक्षकारों एवं क्रियान्वयन एजेंसियाँ सीधे बातचीत द्वारा इस करार की व्याख्या तथा कार्यान्वयन से संबंधित किसी भी विवाद के सौहार्द्रपूर्ण निपटान के लिए प्रयास करेंगे।

## अनुच्छेद 16

वर्ष 1997 के समझौता ज्ञापन तथा वर्ष 2002 के समझौता ज्ञापन का अधिक्रमण

इस करार के लागू होते ही, निम्नलिखित 2 (दो) समझौता ज्ञापनों का स्वतः ही अधिक्रमण हो जाएगा:-

- क. इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान (लापान) तथा भारत गणराज्य के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के बीच 25 अप्रैल, 1997 को जकार्ता में उपग्रहों तथा प्रमोचक रaketों के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश स्टेशन की स्थापना में सहयोग के लिए किया गया समझौता ज्ञापन।
- ख. इंडोनेशिया गणराज्य के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष संस्थान तथा भारत गणराज्य के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच 03 अप्रैल, 2002 को नई दिल्ली में बाह्य अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सहयोग पर किया गया समझौता ज्ञापन।

## अनुच्छेद 17

प्रवृत्त होना, अवधि तथा समापन

1. यह करार अंतिम अधिसूचना की प्राप्ति के दिनांक से प्रभावी होगा, जहाँ पक्षकार एक दूसरे को इस करार के लागू होने हेतु इसके आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में राजयनिक चैनलों के माध्यम से सूचित करेंगे।
2. यह करार 5 (पाँच) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा तथा इसे इसके समापन के 6 (छह) माह पहले पक्षकारों के पारस्परिक लिखित सहमति द्वारा अगले 5 (पाँच) वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
3. इस करार को किसी भी पक्षकार द्वारा राजनयिक माध्यम से लिखित अधिसूचना द्वारा समाप्त किया जा सकता है। अधिसूचना के दिनांक से 6 (छह) माह के बाद यह समाप्त हो जाएगा।

4. इस करार की समाप्ति के मामले में इसके प्रावधान, इसकी समाप्ति के समय प्रभावी सभी क्रियान्वयन व्यवस्थाओं अथवा सभी अधूरे कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं पर जारी रहेंगे, जब तक कि पक्षकार अन्यथा सहमत न हो। इस करार की समाप्ति, परिशोधन हेतु आधार के रूप में कार्य नहीं करेगा अथवा वित्तीय या संविदागत प्रकृति के दायित्वों का समापन जारी रहेगा तथा इससे कानूनी रूप में व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकारों और दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो कि इस करार के समाप्ति के पहले उत्पन्न हुआ है।

साक्ष्य के रूप में, अपनी संबंधित सरकारों द्वारा प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

बाहासा इंडोनेशिया, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में, दो मूल प्रतियों में, जकार्ता, इंडोनेशिया में ...<sup>23</sup>...मई 2018 तथा बेंगलूरु, भारत में ...<sup>29</sup>...मई 2018, को हस्ताक्षर किए गए। सभी तीनों पाठ समान रूप में प्रामाणिक हैं। इसकी व्याख्या में किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

इंडोनेशिया गणराज्य सरकार

के लिए

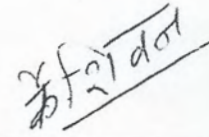


थामस डिजमालुदीन,

अध्यक्ष, लापान

भारत गणराज्य सरकार

के लिए



कै. शिवन,

सचिव, अंतरिक्ष विभाग/अध्यक्ष, इसरो



REPUBLIK INDONESIA

**FRAMEWORK AGREEMENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
ON  
COOPERATION IN THE EXPLORATION AND USES OF  
OUTER SPACE FOR PEACEFUL PURPOSES**

**The Government of the Republic of Indonesia**

and

**The Government of the Republic of India**

(hereinafter collectively referred to as the "Parties"),

**NOTING** the existing mutually beneficial cooperation between the Parties in the field of space science & technology;

**RECOGNIZING** the Cooperation between the Parties in the area of Telemetry, Tracking and Command (TT&C) support for Indian satellites and launch vehicles through the TT&C Stations established at Biak in Indonesia and in capacity building;

**TAKING INTO ACCOUNT** the agreed minutes of the Second Joint Committee Meeting on space cooperation between ISRO and LAPAN held during June 28-29, 2011 at New Delhi, the LAPAN-ISRO Third Joint Committee Meeting on Outer Space held in Jakarta on 17-19 November 2014, and the ISRO-LAPAN Fourth Joint Committee Meeting on Outer Space held in Bangalore on 14-15 November 2017;

70



**CONSIDERING** the provisions of the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, including the Moon and Other Celestial Bodies, of January 27, 1967 and of related multilateral treaties and agreements on the exploration and use of outer space to which both Governments are Parties, which encourage international cooperation for exploration and peaceful uses of outer space;

**EXPRESSING** their mutual desire to enhance their long-term cooperation in the field of exploration of outer space and application of space technologies for the benefit of the people of both Countries;

**SEEKING** to preserve outer space for peaceful purposes open to wide international cooperation;

**DESIRING** to establish an overall legal framework to facilitate cooperation in the peaceful uses of outer space between both Parties and the conclusion of Implementing Arrangements for cooperation between their implementing agencies;

**PURSUANT** to the prevailing laws and regulations of the respective Countries;

**HAVE AGREED AS FOLLOWS:**

#### **ARTICLE 1**

##### **Purpose**

The Parties shall promote cooperation between the two Countries in the field of outer space research and use of outer space for peaceful purposes in accordance with the respective national laws and regulations in force and their international obligations, commitments and principles of international law.

3/20

## ARTICLE 2

### Implementing Agencies and Designated Institutions

1. The Government of the Republic of Indonesia designate the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) and the Government of the Republic of India designate the Indian Space Research Organisation (ISRO) as their respective Implementing Agencies, who will be responsible for the development, coordination and control of cooperation, as well as carry out the Cooperative Programmes envisaged under this Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of India on Cooperation in the Exploration and Uses of Outer Space for Peaceful Purposes (hereinafter referred to as the "Agreement").
2. The Parties or the Implementing Agencies within the limits of their competence may designate other institutions to develop Cooperative Programmes in areas enumerated in Article 3 below. In such a case, that Party or its Implementing Agency shall duly notify the other Party or its Implementing Agency the designated institution in charge of the Cooperative Programme.
3. Designation of any other institutions for the development and execution of the Cooperative Programmes as stipulated in Article 3 of this Agreement shall be mutually agreed upon by the Parties.

## ARTICLE 3

### Scope of Cooperation

The scope of cooperation under this Agreement are as follow:

- a. Space science, exploration of outer space, use of space technology, monitoring of the earth's environment from outer space and remote sensing of the earth;

26/12

- b. Developing multidisciplinary forms of cooperation in the practical application of space technology and using the spin-off benefits of space technologies;
- c. Operation, maintenance, augmentation, upgradation, and use of Integrated Biak Ground Stations for mutual benefit of both Parties;
- d. Hosting of Indian Ground Station in Indonesia for Indian Remote Sensing Satellites including data sharing;
- e. Hosting of IRNSS Range and Integrity Monitoring Station (IRIMS) equipment for NAVIC Program;
- f. Joint research and development activities in space technology including on sounding rockets;
- g. Operation and utilisation of satellites, and payload hosting for space science missions;
- h. In kind support for launch services of 2 (two) LAPAN made satellites every 5 (five) years;
- i. Cross utilisation of ground stations owned by the Parties;
- j. Exchange of technical and scientific personnel designated to participate in the cooperative programmes;
- k. Organisation of training, workshop and seminar programmes in areas of mutual interest;
- l. Other scope of cooperation as mutually agreed in writing by the Parties.

#### **ARTICLE 4**

##### **Implementing Arrangements and Cooperative Programmes**

1. For the implementation of this Agreement, the Parties may conclude specific Implementing Arrangements, which shall refer to and be subject to this Agreement, unless the Parties agree otherwise.
2. The Implementing Agencies and other designated institutions may, subject to procedures established by the laws and regulations of their respective Countries:

- a. agree on specific Cooperative Programmes, which will determine the principles, rules and procedures related to the organisation, implementation and, if necessary, financial support to such programmes;
  - b. conclude Implementing Arrangements, which shall include, as appropriate, provisions related to the nature and scope of the Cooperative Programmes and the individual and common responsibilities of the Implementing Agencies or other designated institutions. Such Implementing Arrangements shall refer to and be subject to this Agreement.
3. In accordance with the prevailing laws, regulations and policies of the respective Countries, and upon mutual written consent of the Parties, any other third party may participate in the Cooperative Programmes carried out within the framework of this Agreement. Such participation from third parties shall be concluded in separate arrangements.

## **ARTICLE 5**

### **Joint Working Group and Project Teams**

1. The Parties shall set up a Joint Working Group with members from both Parties and co-chaired by nominees from both Parties for the purpose of achieving the goals of this Agreement.
2. The Joint Working Group shall meet at least once a year, alternately in Indonesia and India.
3. The Joint Working Group shall be responsible for examining the Cooperative Programmes, following up on their implementation, promoting cooperation between both countries within the ambit of this Agreement, and in a general manner examining all questions with respect to the

performance of this Agreement and finding insofar as possible an amicable solution to any dispute that could arise between the Parties.

4. The Parties or, upon their authority, the Implementing Agencies, may set up Project Teams if necessary, to manage specific cooperative projects taken up under Implementing Arrangements.

## **ARTICLE 6**

### **Principles of Financing**

1. The Parties intend that the mutually agreed Programmes shall be performed on a cooperative basis. Funding arrangements for such activities shall be agreed upon by the Parties mutually on a case by case basis.
2. The financing of joint activities carried out pursuant to this Agreement shall be provided by the Parties in accordance with the laws and regulations of respective Parties and subject to the availability of funds allocated for these purposes.
3. The detailed financing of each project shall be drawn up in the respective implementing arrangement.
4. Nothing in this Article shall be construed as creating additional obligations for the Republic of Indonesia and the Republic of India concerning budgetary provisions to finance cooperation conducted pursuant to this Agreement.

Handwritten initials or signature in the bottom right corner.

**ARTICLE 7**  
**Intellectual Property**

1. The Parties and their respective Implementing Agencies as well as their respective designated institutions, take the obligation to ensure effective protection of intellectual property created and rights obtained from Cooperative Programmes carried out under this Agreement, in accordance with prevailing national laws of each Party and the international agreements to which they are parties to.
2. The specific and detailed terms and conditions that will determine the ownership of intellectual property including the intellectual property resulted from the implementation of this Agreement will be defined in each Implementing Arrangement.
3. The Implementing Agencies shall inform one another in a timely fashion of any inventions or copyrighted works arising out of this Agreement and Implementing Arrangements and promptly seek protection for such intellectual property.

**ARTICLE 8**  
**Transfer of Title and Further Utilisation of Integrated Biak TT&C Facilities**

The Parties agreed that for the transfer of title and further utilisation of integrated Biak TT&C facilities from ISRO to LAPAN, respective separate agreements shall be arrived at through mutual discussions between the Parties within 6 (six) months after signing of the Agreement.

ch

**ARTICLE 9**  
**Exchange of Information**

1. In accordance with their respective laws and regulations and observing the conditions of confidentiality envisaged under Article 10 of this Agreement, the Parties and their respective Implementing Agencies shall provide access, on a mutual basis and within a reasonable time, to the results of scientific research and work jointly carried out within the framework of this Agreement in accordance with the Implementing Arrangement in any chosen area of cooperation.
2. The Parties shall exchange scientific and technical results from any cooperation prepared and undertaken under this Agreement and Implementing Arrangement. Such results cannot be transferred to third parties without prior mutual consent of the Parties.
3. The Parties, through their Implementing Agencies according to their prevailing national laws concerning the information of limited access, shall facilitate the mutual exchange of information concerning the basic directions of their respective national space programmes.

**ARTICLE 10**  
**Confidentiality**

1. All the information exchanged by the Parties and their respective Implementing Agencies in the course of implementation of cooperative programmes shall be considered as confidential unless otherwise expressed by the Parties in writing.
2. Each Implementing Arrangement will define, inter-alia, the terms and conditions of confidential information exchange related to the Cooperative Programmes.

*J.R.*

## **ARTICLE 11**

### **Customs Regulations and Exchange of Personnel**

1. In accordance with relevant laws and regulations, each Party shall provide recommendation for customs clearance and work towards waiver of, on best effort basis, all applicable customs duties and taxes for equipment and related goods necessary for the implementation of this Agreement. Such arrangements will be fully reciprocal and in accordance with the respective relevant laws and regulations governing the Parties.
2. Each Party shall provide recommendation for visas, stay permit, and other necessary permits for the personnel visit of the other Party in pursuance of this Agreement.
3. The Parties shall ensure that their personnel involved in the activities agreed under this Agreement shall respect political independence, sovereignty and territorial integrity of the host country, and shall have a duty not to interfere in internal affairs of the host country.
4. The Parties shall ensure that their equipment involved in the activities agreed under this Agreement shall not be used for any purpose other than set forth in this Agreement.

## **ARTICLE 12**

### **Transfer of Goods and Technical Data**

All transfers of goods and technical data by Parties shall be carried out in accordance with their national laws and regulations.

*Handwritten initials*



### **ARTICLE 13**

#### **Liability**

The Parties and their respective Implementing Agencies agree on a comprehensive mutual waiver of claims among them and other designated institutions for damages caused to their goods or personnel loss directly involved in the implementation of this Agreement.

### **ARTICLE 14**

#### **Amendment**

This Agreement may be amended at any time by mutual written consent of the Parties. Such amendments shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties and shall constitute an integral part of this Agreement.

### **ARTICLE 15**

#### **Settlement of Disputes**

The Parties and their Implementing Agencies shall endeavour to resolve amicably any disputes concerning the interpretation and implementation of this Agreement through direct negotiations.

### **ARTICLE 16**

#### **Supereession of MoU 1997 and MoU 2002**

Upon entry into force of this Agreement, the 2 (two) following Memorandum of Understanding shall be automatically superseded:

- a. Memorandum of Understanding between National Institute of

Aeronautics and Space (LAPAN) of the Republic of Indonesia and Indian Space Research Organisation (ISRO) of the Republic of India for Cooperation in the Establishment of Telemetry, Tracking and Command Station for Satellites and Launch Vehicles, signed at Jakarta on April 25, 1997.

- b. Memorandum of Understanding between the National Institute of Aeronautics and Space of the Republic of Indonesia and the Indian Space Research Organisation of the Republic of India on Cooperation in the field of Outer Space Research and Development, signed at New Delhi on April 03, 2002.

#### ARTICLE 17

##### Entry into Force, Duration and Termination

1. This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last notification whereby the Parties inform each other through diplomatic channels of the completion of its internal procedures necessary for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and may be extended for subsequent periods of 5 (five) years by mutual written consent of the Parties 6 (six) months before the end of the expiration.
3. This Agreement may be terminated by either Party by giving written notification through diplomatic channel. The termination shall take effect 6 (six) months following the date of the notification.
4. In the event of the termination or expiration of this Agreement, its provisions shall continue to apply to all Implementing Arrangements in effect at the time of termination or expiration of all unfinished programmes and projects.

21

unless the Parties do not agree otherwise. The termination of this Agreement shall not serve as the basis for the revision or termination of obligations of a financial or contractual nature still in force and shall not affect the rights and obligations of legal persons and citizens which have arisen before the termination of this Agreement.

**IN WITNESS WHEREOF**, the undersigned, being duly authorized thereto by their Governments, have signed this Agreement.

**DONE** in two originals at New Delhi on this 23 day of May in the year 2018 and at Jakarta on this 29 day of May in the year 2018 in Indonesian, Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

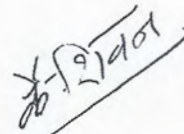
FOR THE GOVERNMENT OF  
THE REPUBLIC OF INDONESIA



**THOMAS DJAMALUDDIN**  
CHAIRMAN of LAPAN

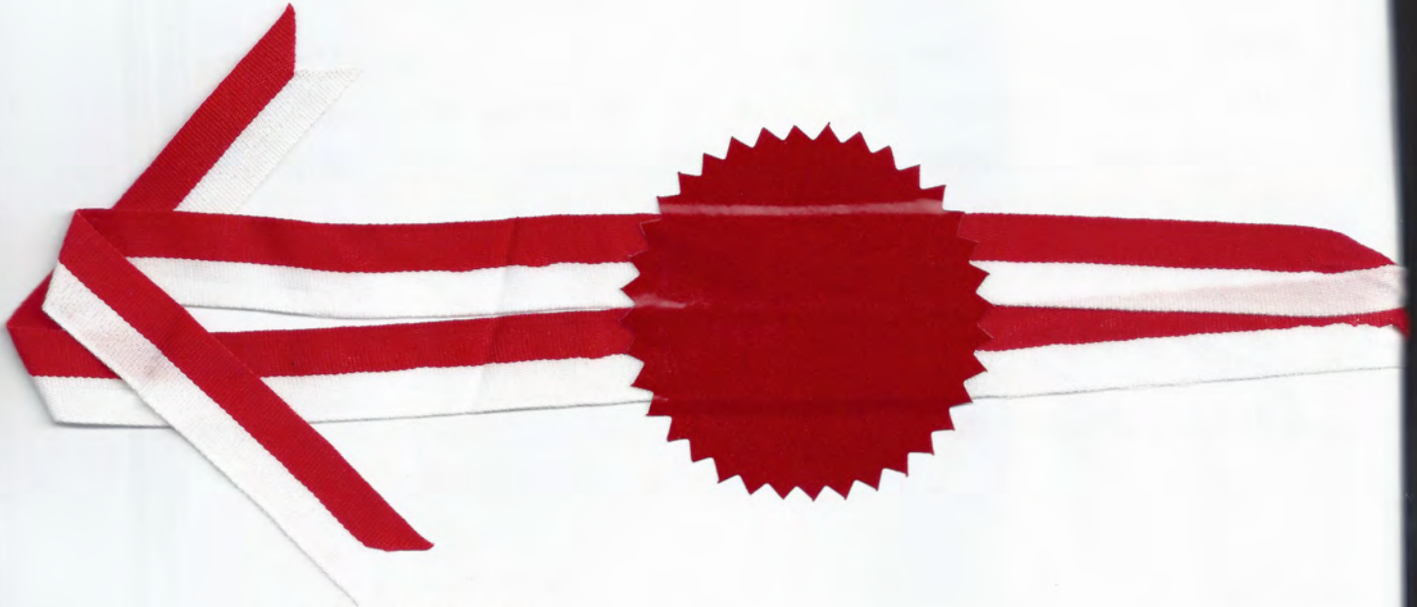
Date: May 2018

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA



**K. SIVAN**  
SECRETARY DOS /  
CHAIRMAN of ISRO


Date: May 2018



Salinan naskah resmi  
*Certified true copy*

Nomor : 0091/CTC/05/2019/52  
Number



  
Sulaiman  
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional  
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia  
*Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties*  
*Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia*

Tanggal : 6 Mei 2019  
*Date*